

# **PERKEMBANGAN PERS, KEBEBASAN PRESS, DAN TANGGUNGJAWAB JURNALISTIK PASCA REFORMASI (Bookchapter)**

**Seminar Nasional 2021  
Pusat Studi Hak Asasi Manusia  
Universitas Muhammadiyah Prof. Dr. HAMKA  
kerjasama dengan  
Pusat Studi Hukum Publik**

**Penulis:**

**Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. - Supto Handoyo DP, S.H., M.H.  
Jailani, S.E., M.M. - Mustika Mega Wijaya, S.H., M.H.  
Ari Wuisang, S.H., M.H. - Dr. Asmak Ul-Husnah, S.H., M.H.  
Rizkindo Junior Rizaldy - Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H.  
R Muhammad Mihradi, S.H., M.H. - Dr. Saharuddin Daming, S.H., M.H.  
Nazaruddin Lathif, S.H., M.H. - Cahya Adhitya Pratama  
Herdin Muhtarom - Muhammad Azhar Nawawi, S.Pd.**

**Editor:  
Mubarak Ahmad**

**PERKEMBANGAN PERS, KEBEBASAN  
PRESS, DAN TANGGUNGJAWAB  
JURNALISTIK PASCA REFORMASI  
(*Bookchapter*)**

**Seminar Nasional 2021  
Pusat Studi Hak Asasi Manusia  
Universitas Muhammadiyah Prof. DR. HAMKA  
kerjasama dengan  
Pusat Studi Hukum Publik**

**Penulis:**

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. - Sapto Handoyo DP, S.H., M.H.  
Jailani, S.E., M.M. - Mustika Mega Wijaya, S.H., M.H. - Ari Wuisang, S.H., M.H.  
Dr. Asmak Ul-Husnah, S.H., M.H. - Rizkindo Junior Rizaldy  
Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H.  
R Muhammad Mihradi, S.H., M.H. Dr. Saharuddin Daming, S.H., M.H.  
Nazaruddin Lathif, S.H., M.H. - Cahya Adhitya Pratama  
Herdin Muhtarom - Muhammad Azhar Nawawi, S.Pd

**Editor:**

Mubarak Ahmad



**Penerbit UIKA Press**

# **PERKEMBANGAN PERS, KEBEBASAN PRESS, DAN TANGGUNGJAWAB JURNALISTIK PASCA REFORMASI (Bookchapter)**

Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H.

Sapto Handoyo DP, S.H., M.H.

Jailani, S.E., M.M.

Mustika Mega Wijaya, S.H., M.H.

Ari Wuisang, S.H., M.H.

Dr. Asmak Ul-Husnah, S.H., M.H.

Rizkindo Junior Rizaldy

Mukhlis Muhammad Maududi, S.Sos., S.H., M.H.

R Muhammad Mahradi, S.H., M.H.

Dr. Saharuddin Daming, S.H., M.H.

Nazaruddin Lathif, S.H., M.H.

Cahya Adhitya Pratama

Herdin Muhtarom

Muhammad Azhar Nawawi, S.Pd.

© 2021

Cetakan ke 1 September 2021

ISBN: 978-623-6712-49-8

Editor : Mubarak Ahmad

Desain Cover: Tohir Solehudin, S.Pd.

Tata Letak (*Layouter*) : Raziv Akbar, S.T.

Diterbitkan Oleh: UIKA PRESS (Universitas Ibn Khaldun Bogor)

Jalan KH. Sholeh Iskandar Km. 2 Kota Bogor 16162

Email: [uikapress@uika-bogor.ac.id](mailto:uikapress@uika-bogor.ac.id)

Website: [www.uikapress.uika-bogor.ac.id](http://www.uikapress.uika-bogor.ac.id)

Anggota IKAPI No.: 295/JB/2016 - Anggota APPTI No.: 001.023.1.10.2017

15 x 23 cm

Him. viii + 242

---

Hak Cipta dilindungi oleh Undang-Undang tentang sistem perbukuan salah satunya melarang memperbanyak buku ini sebagian atau seluruhnya, dalam bentuk dan dengan cara apa pun juga, baik secara mekanis maupun elektronik, termasuk fotocopi, rekaman, dan lain-lain tanpa izin tertulis dari penulis dan isi buku adalah tanggung jawab penulls.

---

# DAFTAR ISI

<b>PRAKATA .....</b>	<b>iii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>v</b>
<b>IMPLEMENTASI ETIKA PROFESI PERS</b>	
Dr. A. Muhammad Asrun, S.H., M.H. ....	1
<b>PENERAPAN PASAL 18 AYAT (1) UNDANG- UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999 TENTANG PERS DALAM PRAKTIK PERADILAN</b>	
Sapto Handoyo DP, S.H., M.H.....	35
<b>POTRET KEBEBASAN PERS DAN KEBEBASAN BEREKPRESI DALAM BINGKAI DEMOKRASI WEBINAR NASIONAL "PERKEMBANGAN DAN KEBEBASAN PERS PASCA REFORMASI"</b>	
Jailani, S.E., M.M. ....	61
<b>LITERASI MEMBANGUN DEMOKRASI YANG SEHAT DALAM DINAMIKA KEBEBASAN PERS DI INDONESIA</b>	
Mustika Mega Wijaya, S.H., M.H. ....	87
<b>GOOD GOVERNANCE DAN KETERBUKAAN INFORMASI DALAM PERSPEKTIF ADMINISTRASI PEMERINTAHAN</b>	
Ari Wuisang, S.H., M.H. ....	113
<b>PENGATURAN DI BIDANG PERS DI ERA ORDE LAMA, ORDE BARU, DAN PASCA REFORMASI 1998</b>	
Dr. Asmak Ul-Husnah, S.H., M.H. ....	133

**PENERAPAN PASAL 18 AYAT (1)  
UNDANG-UNDANG NOMOR 40 TAHUN 1999  
TENTANG PERS DALAM PRAKTIK  
PERADILAN**

**Sapto Handoyo DP, S.H., M.H.**

Dosen Fakultas Hukum Universitas Pakuan email:

sapto.handoyo@unpak.ac.id

**Abstrak**

Pasal 1 ayat (3) UUD Tahun 1945 menyatakan negara Indonesia adalah negara hukum. Sebagai negara hukum yang berdasarkan pada Pancasila dan UUD Tahun 1945, negara mengakui dan menjamin bahwa kemerdekaan pers merupakan salah satu wujud kedaulatan rakyat dan menjadi unsur penting demi terciptanya kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang demokratis. Jaminan terhadap hak asasi manusia, pembagian kekuasaan dalam negara, serta pengawasan dari badan-badan peradilan oleh pemerintah, merupakan unsur yang harus dipenuhi oleh suatu negara hukum, khususnya terhadap kemerdekaan berserikat, menyatakan pikiran dengan lisan dan tulisan seperti yang tercantum dalam Pasal 28 UUD Tahun 1945 yang menjadi dasar dari keberadaan pers nasional. Kemerdekaan pers dijamin sebagai hak asasi warga negara, hal ini dipertegas dalam ketentuan Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 tentang Pers. Pers merupakan institusi yang sangat penting dan berpengaruh dalam menyebarkan informasi serta pembentukan opini publik.

**Kata Kunci:** Undang-Undang Tentang Pers, Praktik Peradilan

## A. Pendahuluan

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan merupakan hak asasi setiap warga negara Indonesia sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 28 UUD Tahun 1945. Pasal ini mencerminkan bahwa negara Indonesia bersifat demokratis.<sup>1</sup> Pengakuan terhadap hak tersebut dipertegas dalam Pasal 23 ayat (2) dan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Pasal 23 ayat (2) Undang-Undang HAM menyatakan bahwa setiap orang bebas untuk mempunyai, mengeluarkan dan menyebarkan pendapat sesuai hati nuraninya, secara lisan dan atau tulisan melalui media cetak maupun elektronik dengan memperhatikan nilai-nilai agama, kesusilaan, ketertiban, kepentingan umum dan keutuhan bangsa.<sup>2</sup> Sedangkan Pasal 24 ayat (1) Undang-Undang HAM menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkumpul, berapat dan berserikat untuk maksud-maksud damai.<sup>3</sup>

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya juga diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum. Kemerdekaan menyampaikan pendapat tersebut sejalan dengan Pasal 19 Deklarasi Universal Hak-hak Asasi Manusia yang menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kebebasan mempunyai

<sup>1</sup> Mardenis, *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Rangka Pengembangan Kepribadian Bangsa*, (Jakarta: Sinar Grafika, 2016), hlm. 24.

<sup>2</sup> Indonesia, *Undang-Undang tentang Hak Asasi Manusia*, UU No. 39 Tahun 1999, Pasal 23 ayat (2).

<sup>3</sup> *Ibid.*, Pasal 24 ayat (1)

## **PERKEMBANGAN PERS, KEBEBASAN PRESS, DAN TANGGUNGJAWAB JURNALISTIK PASCA REFORMASI (Bookchapter)**

Pers merupakan komponen penting di dalam demokrasi, pers menjadi salah satu alat yang menyalurkan segala bentuk aspirasi yang menumbuhkan dan merawat nilai-nilai demokrasi. Di Indonesia, pers mengalami proses yang panjang ketika berupaya memperoleh kebebasannya. Berakhirnya masa Orde Baru dan memasuki masa reformasi, kebebasan pers pun mulai dihidupkan kembali sesuai dengan aturan yang berlaku di dalam Undang-Undang Dasar 1945. Akan tetapi pasang surut kebebasan pers tidak berhenti di masa reformasi, dalam beberapa periode kepemimpinan dari Presiden Habibie sampai pada masa kepemimpinan Presiden Joko Widodo kebebasan pers masih menjumpai tantangan-tantangan yang menghambat independensi dan jaminan keamanan insan pers tersebut, salah satu upaya-upaya yang dirasakan sebagai penghambat kebebasan pers yakni munculnya produk hukum yang berbentuk Undang-Undang ITE. Pers dalam menjalankan kebebasan bertanggung jawab diatur dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 1999 sebagai rujukan dalam etika profesi pers sebagai media jurnalisme. Profesionalisme pers bertindak dengan bertanggung jawab terhadap publik dengan memproduksi berita secara cepat dan tepat, selain itu memiliki tanggung jawab secara pribadi sebagai bentuk idealisme pers. Pers dituntut untuk menjaga integritas, netralitas, dan profesionalitas di dalam menjalankan seluruh kegiatannya.



Diterbitkan oleh: **UIKA PRESS**  
Universitas Ibn Khaldun Bogor  
Jalan KH. Sholeh Iskandar Km.2  
Kota Bogor 16162, Jawa Barat-Indonesia  
Email: [uikapress@uika-bogor.ac.id](mailto:uikapress@uika-bogor.ac.id)  
Website: [www.uikapress.uika-bogor.ac.id](http://www.uikapress.uika-bogor.ac.id)

